



Media: Tribun Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 29 Februari 2020

Halaman: 9

Dewan Tak Setuju Kenaikan Dipaksakan

KALANGAN legislatif menyoroti upaya Pemerintah Kota Yogyakarta terkait permohonan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara kolektif.

Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Susanto Dwi Antoro mempertanyakan kesediaan ketua RW. Dalam permohonan keringanan PBB, ketua RW diminta menjadi koordinator. Dimana seluruh berkas

akan diserahkan kepada ketua RW, sebelum diajukan ke Balaikota Yogyakarta.

"Proses kolektif ini masih saya pertanyakan, terkait kesediaan ketua RW apakah bersedia untuk melaksanakannya?" katanya pada *Tribun Jogja*, Jumat (28/02/2020).

Tak hanya kesediaan ketua RW, Anto-

● ke halaman 15

GRAFIS/FAUZIARAHMAN

Dewan Tak

● Sambungan Hal 9

ro juga mempertanyakan kesanggupan tim verifikasi.

"Dari 95 ribu wajib pajak di Kota Yogyakarta, apabila mengajukan se-

mua atau dihitung 50 persennya saja, apakah petugas verifikasi mampu melaksanakan tugasannya?. Masih ditambah rekomendasi keringanan pajak, apabila dalam satu wilayah ada perbedaan," sambungnya.

Ia mengaku masih belum setuju jika kenaikan PBB dipaksakan tahun ini. Hal itu karena proses sosialisasi terkait kebijakan tersebut diabaikan oleh Pemkot Yogyakarta.

"Apakah ada garansi dari Pemkot tidak ter-

jadi kegaduhan masyarakat yang terdampak lagi? Saya masih belum sepakat kalau dipaksakan tahun ini. Karena proses sosialisasi yang terkait kebijakan ini juga diabaikan oleh pemkot," tutupnya. (maw)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005